

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Adib Bahari. 2010. *Prosedur Pendirian Yayasan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amirruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BurhanAshshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cecep Effendi. 2009. *Kumpulan Tulisan Dalam Peringatan Ulang Tahun Ke-40 Prof. Dr. Zudan Arif, SH., MH, Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chidir Ali. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil. 2003. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah di Indonesia. 2011. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri.
- Ni'matul Huda. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudhi Prasetya. 2002. *Yayasan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumaryo Suryokusumo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Teuku May Rudi. 1998. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Universal Declaration of Human Rights.
- Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. *Hukum Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **A. PeraturanPerundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

### **B. Website**

[https://en.wikipedia.org/wiki/International\\_non-governmental\\_organization](https://en.wikipedia.org/wiki/International_non-governmental_organization),

<http://www.kemlu.go.id/id/berita/informasi-penting/Pages/Proses-Dan-Tata-Cara-Pendaftaran-Organisasi-Internasional-Non-Pemerintah.aspx>,

<http://www.kemlu.go.id/id/berita/informasi-penting/Pages/Proses-Dan-Tata-Cara-Pendaftaran-Organisasi-Internasional-Non-Pemerintah.aspx>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_swadaya\\_masyarakat.aspx](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_swadaya_masyarakat.aspx)

<http://www.kemendagri.go.id/news/2016/12/20/pp-59-perketat-berdirinya-ormas-asing-di-indonesia.aspx>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/PP-NO.-59-TAHUN-2016-TENTANG-ORMAS-ASING.aspx>

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kemlu-Koordinasikan-Pengelolaan--Perizinan-Ormas-Asing.aspx>

#### **D. Opini**

Abdul Hakim G. Nusantara. Senin 4 September 2010. *Lindungi Kebebasan Berserikat*. Harian Kompas.

